

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan faktor yang tidak dapat terpisahkan dari rangkaian pelaksanaan pembangunan diberbagai negara. Banyak peran dan sumbangsih pendidikan bagi suatu bangsa, bukan hanya bagi negara, akan tetapi bagi seluruh negara di dunia, terutama negara yang sedang berkembang. Di berbagai negara tersebut tidak pernah berhenti berusaha meningkatkan kualitas pendidikannya, guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga nantinya mampu untuk membangun negara tersebut.

Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja tetapi lebih luas lagi yakni sebagai sarana pembiasaan dan penyaluran nilai (kulturasasi dan sosialisasi). Selain itu secara komulatif terdapat 4 (Empat) komponen penting yang difokuskan oleh program pendidikan meliputi; *Pertama* terkonsentrasi pada peningkatan lingkungan belajar, termasuk infrastruktur, penyediaan perpustakaan kelas, dan materi pembelajaran; *Kedua* berfokus pada masalah kritis program pelatihan guru dan pengawas melalui lokakarya mingguan yang berlangsung di lingkungan sekolah. Komponen kedua ini fokus pada praktik pengajaran yang berkualitas untuk memfasilitasi perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru untuk meningkatkan metode pengajaran secara keseluruhan dan kemampuan untuk bekerja lebih efektif dengan budaya dan masyarakat setempat; *Ketiga* berfokus pada penguatan pembelajaran dan peningkatan harga diri dan kompetensi sosial dalam membantu siswa berprestasi rendah melalui lokakarya yang disampaikan oleh anggota masyarakat yang terlatih; dan *Keempat* penyediaan buku teks yang dikembangkan baru untuk setiap siswa, sementara guru di sisi lain, menerima pelatihan tentang materi baru sebagai bagian dari lokakarya mingguan bersama dengan transkrip manual untuk referensi dan bimbingan (Madani, 2019).

Pendidikan adalah alat penting untuk pertumbuhan sosial dan ekonomi suatu negara. Keterampilan pendidikan dasar seperti membaca dan menulis meningkatkan pendapatan seseorang hingga 10% bertindak sebagai upaya yang mengangkat individu untuk kebebasan, membantu memberantas kemiskinan dan kelaparan internasional. Berbagai negara di dunia telah menyatakan bahwa hal tersebut adalah hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan dengan berbicara melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (forum pendidikan Dunia, 2000). Banyak organisasi telah berjuang untuk mempromosikan pendidikan melalui penerapan strategi dan kebijakan pendidikan baru. Berbagai organisasi seperti Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), Konvensi menentang diskriminasi dalam pendidikan (1960), Konvensi Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya (1966) dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (1981) (UNICEF, 2007). *Education for All policy* (EFA) telah diluncurkan pada konferensi dunia pada tahun 1990 yang sebagai komitmen universal yang menyediakan pendidikan dasar berkualitas untuk semua anak, remaja, dan orang dewasa (Madani, 2019).

Masalah pendidikan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran serta pemerintah tiap negara yang telah membuat rencana program kurikulum yang harus dibuat, guna lancarnya proses pendidikan di tiap negara. Oleh karena itu, peranan kurikulum sangatlah penting, selain harus mengikuti perkembangan jaman juga berisikan visi dan misi pendidikan tersebut. Peran pemerintah sangat diharapkan terutama dalam merumuskan kurikulum tiap tahunnya. Perubahan kurikulum dilakukan oleh badan yang bertanggungjawab langsung terhadapnya, seperti Dinas Kependidikan. Perubahan atau Reformasi kurikulum diluncurkan oleh kementerian pendidikan dan literasi yang merupakan pusat dari rencana pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan

memastikan lebih banyak anak menyelesaikan pendidikan dasar (Global Partnership for Education) (EDUCATION, n.d.).

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri generasi 4.0 yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi serta perkembangan sistem digital, kecerdasan artifisial, dan virtual. Semakin konvergenya batas antara manusia, mesin dan sumber daya lainnya, teknologi informasi dan komunikasi tentu berimbas pula pada berbagai sektor kehidupan. Beberapa dampak terhadap sistem pendidikan di Indonesia antara lain perubahan pembelajaran, cara mengajar, dan sistem evaluasi melalui daring. Perubahan tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun sehingga dibutuhkan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai agar siap menyesuaikan dan mampu bersaing dalam skala global. Peningkatan kualitas SDM melalui jalur pendidikan mulai dari pendidikan dasar dan menengah hingga ke perguruan tinggi adalah kunci untuk mampu mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0. (Lase, 2016).

Seiring perubahan waktu, situasi dan kondisi saat ini, yaitu: di mana dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama Covid-19 (*Corona Virus Diseases-19*). Saat ini penyebaran Covid-19 memiliki dampak pada bidang industri sehingga menyebabkan agenda revolusi industri 4.0 memiliki hambatan. Menurut Abidah, et al. (2020), dampak tersebut juga terasa pada dunia pendidikan, sehingga banyak negara termasuk Indonesia mengambil kebijakan proses pendidikan yang menghadirkan alternatif baru dalam pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran alternatif yang dapat diterapkan di dalam pembelajaran di era pandemi Covid-19.

Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Social distancing menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan

penyebaran Covid-19, karena kebijakan ini berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, namun tidak ada pilihan lain, karena cara ini adalah yang paling efektif. Kebijakan sosial *distancing* berakibat fatal terhadap roda kehidupan manusia, masalah ekonomi yang paling terasa dampaknya karena hal ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat, hambatan laju ekonomi mengakibatkan tertutupnya kebutuhan primer manusia untuk memenuhinya, karena negara akan sangat terbebani kalau harus menanggung segala kebutuhan pokok setiap penduduknya. Bidang pendidikanpun ikut terdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah, membuat kelimpungan banyak pihak.

Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya dapat ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung, dan yang menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Menyikapi tantangan pendidikan di masa darurat kesehatan menekankan pentingnya membangun harmonisasi antara peserta didik, pendidik, dan lembaga agar proses pembelajaran dapat bertahan di tengah kondisi seperti ini. Berbagai pilihan dilakukan dengan menerapkan skema “*Blended Learning*” merupakan sebuah model pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka (*face to-face*) dengan *e-learning*. *Blended learning* merupakan konsep baru dalam pembelajaran dimana penyampaian materi dapat dilakukan di kelas dan On-line (Wardani, Toenlio, & Wedi, 2018).

Ketidaksiapan *stake holder* sekolah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama dalam permasalahan ini, walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi darurat seperti saat ini (<https://kabar->

priangan.com/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-dunia-pendidikan/). Kondisi tersebut dialami hampir di semua lembaga pendidikan di seluruh dunia, masing-masing negara mempunyai cara tersendiri untuk mengoperasionalkan pendidikan terhadap semua komponen yang terlibat di dalamnya, banyak metode atau cara yang dilakukan dengan mempedomani dari WHO yang bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk operasi yang aman melalui pencegahan, deteksi dini dan kontrol COVID-19 di sekolah dan fasilitas pendidikan lainnya. Pedoman ini, walaupun khusus untuk negara-negara yang telah mengkonfirmasi transmisi COVID-19 yang masih relevan dalam semua konteks lainnya. Hal ini dapat mendorong siswa untuk menjadi pendukung pencegahan dan pengendalian penyakit di rumah, sekolah, dan komunitas dengan berbicara kepada orang lain tentang cara mencegah penyebaran virus. Mempertahankan operasi sekolah yang aman atau membuka kembali sekolah setelah penutupan membutuhkan banyak pertimbangan tetapi, jika dilakukan dengan baik, dapat meningkatkan kesehatan masyarakat (Bender, 2020).

Berdasarkan hasil observasi dan studi pendahuluan di lingkungan pendidikan, khususnya Diklat Polri, perubahan yang paling mencolok adalah masifnya penggunaan platform digital untuk proses belajar mengajar. Melalui pendidikan pembentukan Perwira, Lemdiklat Polri bertujuan membentuk Perwira Polri yang berkarakter Kebhayangkaraan sebagai pelopor Revolusi mental dan Penggerak tertib sosial di ruang publik memiliki sikap perilaku, pengetahuan dan keterampilan sebagai penyedia terdepan (*First Line Supervisor*) yang professional, Modern dan Terpercaya guna meningkatkan pelayanan Prima Kepolisian seperti yang pernah disampaikan mengenai kebijakan Kapolri tentang Program Promoter (*Profesional-Modern-Terpercaya*) dalam *Grand Strategy* Polri Tahun 2016-2025. Pada era kepemimpinan Kapolri Bapak Jendral Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A.Ph.D meluncurkan suatu terobosan berupa Motto Promoter (*Profesional, Modern, Terpercaya*). Motto ini

merupakan terobosan yang banyak dinilai positif dari berbagai kalangan. Hal utama yang mendukung *Grand Strategy* Polri kurun waktu 2016 sampai dengan 2025 yaitu Tahap *Strive for Excellence*.

Pada tahapan ini kebutuhan masyarakat akan lebih mengharapkan multi dimensional *service quality* yang efektif dan efisien ditengah globalisasi kejahatan yang makin canggih melalui terobosan Promoter diharapkan pelayanan Polri terhadap masyarakat akan semakin baik. Adapun penjabaran Promoter sendiri adalah sebagai berikut, *Profesional* yaitu meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang mudah dipahami, dilaksanakan dan dapat diukur keberhasilannya. *Modern* yaitu melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan alamsus dan alpalkam yang semakin modern. *Terpercaya* yaitu melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang objektif, transparan, akuntabel dan humanis.

Pengembangan sumber daya manusia membantu menyiapkan manusia atau karyawan untuk memikul tanggung jawab lebih tinggi dalam organisasi atau perusahaan. POLRI memerlukan pendidikan dan pengembangan personalnya khususnya dalam upaya menurunkan keluhan masyarakat terutama dalam penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur; serta memberikan pelayanan terbaik. Pengembangan sumber daya manusia berhubungan erat dengan peningkatan kemampuan intelektual yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan sumber daya manusia berpijak pada fakta bahwa setiap tenaga kerja membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang lebih baik. Pengembangan juga membantu para tenaga kerja untuk

mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan pekerjaan atau jabatan yang diakibatkan oleh adanya teknologi baru atau pasar produk baru (Sadili, 2006).

Pengembangan sumber daya manusia salah satunya adalah pengembangan karier. Dalam rangka pengembangan karier pada organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki pola yang sudah terstruktur melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) dan langkah-langkah motivasi bagi para anggota. Adapun pendidikan dan pelatihan (diklat) berada pada lembaga pendidikan dan pelatihan (Lemdiklat) Polri merupakan Lembaga Pendidikan dibawah Kapolri yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang berfungsi membentuk Personil Polri yang terampil. LEMDIKLAT POLRI juga merupakan salah satu unsur Pelaksana Pendidikan dan Pelaksana Staf Khusus Polri yang terdiri dari: 1) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdikpol); 2) Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian; 3) Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespimpol), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri; 4) Akademi Kepolisian (Akpola), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri.

Tujuan penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakan oleh Polri guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel di lingkungan Polri. Oleh karena itu Polri membuat peraturan khusus tentang penyelenggaraan pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentang prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pelatihan tercantum pada pasal 3 yaitu legalitas, akuntabilitas, transparansi, humanis, bertingkat, bertahap dan berlanjut.

Setukpa Lemdiklat Polri sebagai unsur pelaksana Pendidikan yang menyiapkan peserta didik dari brigadir Polisi menjadi Perwira Pertama Polisi, dalam

menyelenggarakan Pendidikan harus mampu menyentuh dimensi dasar kemanusiaan, yaitu (1) *Afektif* yang tercermin pada kualitas keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia termasuk budi pekertiluhur serta kepribadian unggul dan kompetensi estetis; (2) *Kognitif* yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) *Psikomotorik* yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis dan kompetensi kinestetis (Bloom & Krathwohl, 1956).

Selain itu, pendidikan yang ada di Setukpa Polri dirancang untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan manajemen, keterampilan berpikir analitis dan kritis untuk pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian, dan serangkaian keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan fungsi dan praktik manajemen organisasi (Martin, 2017). Proses pelaksanaan selesai diharapkan kepada para lulusan pendidikan polisi dituntut mampu membuat keputusan sulit setiap hari. Peserta didik membutuhkan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik untuk sukses dalam pekerjaan mereka (Martin, 2014).

Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi sendiri turut menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu, di mana seluruh komponen yang berwenang melakukan metode-metode bagaimana caranya Pendidikan dan Pelatihan tetap berjalan dengan waktu yang telah ditentukan. Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi merumuskan Proses Belajar Mengajar menggunakan metode daring, di mana seluruh peserta didik dipulangkan dan mengikuti PBM dari kediaman masing-masing. Akan tetapi kondisi tersebut masih menjadi masalah yang masih dikaji berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan hasil program pembelajaran dengan metode daring yang dilaksanakan. Harapannya bagi peserta didik tentunya akan muncul pengalaman-pengalaman baru yang akan mengubah struktur kognitifnya sesuai dengan teori belajar yang di kemukakan oleh Jean Piaget tentang teori konstruktivisme sebagai proses membangun atau menyusun pengetahuan atau menyusun

pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalamannya (Wina Sanjaya, 2006). Berbagai pengalaman ini diharapkan akan tumbuh kemampuan siswa sehingga dapat menemukan beberapa hal baru dan mengkonstruksi pengetahuan-pengetahuan lamanya.

Salah satu hal yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan mutu pembelajaran daring di Setukpa Lemdiklat Polri adalah dengan melakukan evaluasi. Jika suatu program tidak dievaluasi maka tidak akan diketahui bagaimana dan seberapa baik program tersebut telah terlaksana. Ada beberapa penelitian relevan dari Karnama (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh pendidikan dan pelatihan (diklat) secara signifikan terhadap pengembangan karir perwira. Selain itu, penelitian dari Indah (2020) melakukan analisis berkaitan budaya kerja pada pusat pendidikan intelijen keamanan lembaga pendidikan dan pelatihan Polri. Masih jarang evaluasi tentang pelatihan dan pendidikan di lemdiklat polri dilakukan. Untuk itu program pelatihan dan pendidikan di Setukpa Lemdiklat Polri, perlu dievaluasi agar dapat dilakukan pembenahan pada pelaksanaannya yang dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi program adalah salah satu upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. *The standford evaluation consortium group* menegaskan bahwa meskipun evaluator menyediakan informasi, evaluator bukanlah pengambil keputusan tentang suatu program.

Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Evaluasi sama artinya dengan kegiatan supervisi. Oleh karena itu, penelitian ini berkaitan dengan suatu program pendidikan dan pelatihan di Setukpa Lemdiklat Polri dilakukan evaluasi dengan menggunakan model *Countance Stake* dengan komponen-komponen yang dapat ditinjau dari aspek masukan (*antecedent*), proses (*transaction*), dan dampak (*outcomes*). Model evaluasi ini masih belum banyak dilakukan untuk meninjau

program pelatihan dan pendidikan di lemdiklat Polri.

Dengan demikian bertitik tolak dari adanya keperluan pembenahan yang harus dilakukan pada program Pendidikan dan pelatihan di Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi maka dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan kajian penelitian yang berkaitan dengan “Evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi di Setukpa Lemdiklat Polri”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan dengan memperhatikan model yang digunakan maka focus penelitian ini dirancang untuk mengetahui (1) Ketepatan Program Pendidikan dan Pelatihan Polri T.A. 2020 dengan dengan metode daring (2) kesesuaian Program Pendidikan dan Pelatihan Polri T.A. 2020 dengan metode daring serta (3) Mengidentifikasi hasil pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Polri T.A. 2020.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang sudah dirumuskan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan berikut ini:

1. Bagaimanakah evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring di Setukpa Lemdiklat Polri ditinjau berdasarkan aspek *antecedent*?
2. Bagaimanakah evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring di Setukpa Lemdiklat Polri ditinjau berdasarkan aspek *transaction*?
3. Bagaimanakah evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring di Setukpa Lemdiklat Polri ditinjau berdasarkan aspek *outcome*?

D. Manfaat Hasil Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian “Evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi di Setukpa Lemdiklat Polri”. Ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau

signifikansi akademis dan praktis seperti berikut:

1. Menjadi bahan masukan dan informasi komparatif pengembangan model pelatihan bagi perluasan kajian akademik berkaitan dengan penggunaan model *Countenance Stake* untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi di Setukpa Lemdiklat Polri.
2. Penggunaan model *Countenance Stake* dalam penyusunan instrumen evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi di Setukpa Lemdiklat Polri atau lembaga pemerintahan lain yang melaksanakan program sejenis untuk dijadikan acuan dalam mengevaluasi program peningkatan kompetensi.
3. Menambah khasanah pemikiran dan kajian praktis tentang strategi pengembangan mutu, proses dan hasil pendidikan melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik (Gadik), tenaga kependidikan (Gadikan).

